

## C.2.1

### Latar Belakang:

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan rasional penetapan standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang mencakup: sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. **Tata pamong juga harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlanjutan perguruan tinggi.** Pada bagian ini harus dideskripsikan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/ GUG), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama dengan mitra.

## C.2.2

### Kebijakan:

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.

#### Prinsip ISO 9001: 2015 Clausul 6.1.2

Clause 6 - organization is required to identify risks and opportunities related to QMS performance and take appropriate actions to address them

## C.2.3 Strategi Pencapaian Standart

Bagian ini menjelaskan mekanisme penetapan dan pencapaian standar perguruan tinggi terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tata kelola (sistem pengelolaan dan system penjaminan mutu) dan kerjasama. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

## C.2.4 Indikator Kinerja Utama

### a. Tata Pamong dan Tata Kelola

- 1) Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta **memitigasi potensi risiko**, termasuk dalam pengembangan organisasi.

Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.

- 3) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.

## b. Kepemimpinan

Ketersediaan dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan yang mencakup 3 aspek berikut:

- 1) Kepemimpinan Operasional.
- 2) Kepemimpinan Organisasional
- 3) Kepemimpinan Publik.

## c. Pengelolaan

1) Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

2) Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.

3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.

4) Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, **pengelolaan dan pengendalian risiko**, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan danaudit).



# IDENTIFIKASI POTENSI RISIKO DAN MITIGASI ACTION

Nama Proses : Aktifitas Jurusan/Prodi ....

No	Urutan Proses	Risk Identification		Risk Evaluasi		Assesment (H/M/L)	Cara Penanganan (Mitigation Action)
		Aspect / (Penyebab timbulnya Risk)	Impact/Akibat (Risk)	Li	S		
1	Penyerahan perangkat perencanaan perkuliahan (RPS) dosen melampaui target waktu yang ditentukan	kurang koordinasi, overload pekerjaan, lupa, sakit	Menurunkan indeks kinerja akademik dan sasaran kinerja pegawai	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya
2	Penyerahan nilai dosen yang terlambat dari batas waktu maksimal yang ditentukan	lupa, sibuk, sakit	Menghambat yudisium, menghambat proses sidang sarjana, menghambat proses penyusunan KRS	M	H	H	Dibuatkan program pengendalian mahasiswa DO
3	Mahasiswa Drop Out (DO)	masalah akademis, masalah keuangan & masalah non akademis lainnya	Menambah persentase angka DO menurunkan mutu akreditasi	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya
4	Proses bimbingan skripsi yang tidak maksimal	adanya ketidakcocokkan mahasiswa dengan pembimbing serta tidak dilakukannya monev proses bimbingan	Menghambat terget rata-rata waktu lulus mahasiswa	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya
5	Proses perkuliahan yang belum memenuhi persyaratan takaran EWMP (Equivalent Wajib Mengajar Penuh)	dosen sibuk, beberapa tatap muka dilakukan secara klasikal (tatap muka terstruktur), tidak diiringi dengan tugas mandiri dan tugas terstruktur	Proses perkuliahan tidak dapat dipastikan mutunya	H	H	H	Dibuatkan program pengendalian perkuliahan berbasis EWMP
6	Sebagian masa studi mahasiswa masih relatif lama	malas, kurang memiliki motivasi untuk segera menyelesaikan studi	Menghambat terget rata-rata waktu lulus mahasiswa sebagai bentuk reputasi PTKIN dan pemenuhan standar akreditasi	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya
7	Waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan sesuai bidang ilmunya relatif lama, ≥ 6 bulan	Sebagian mahasiswa memiliki persepsi bahwa orientasi kerja adalah menjadi PNS	Reputasi lulusan siap kerja terganggu dan standar waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan mempengaruhi daya saing	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya

Legend

- likelihood (tingkat keseringan kemungkinan yang terjadi) dan Saverity (Keparahan dari Resiko)**
- Li likelihood (L : tidak pernah; M: Pernah terjadi; H: Sering terjadi)  
(L : tidak mungkin; M: mungkin terjadi; H: sangat mungkin terjadi)
- S Severity (L : tidak menimbulkan efek mutu; M: menimbulkan tapi tidak significant; H: significant)
- Nilai  
Low Pengendalian dengan IK cukup  
Mid Pengendalian dengan IK + monitoring  
High dibuatkan program

		M	H	H
Likelihood	M	L	M	H
	L	L	L	M
		L	M	H
		saverity		

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
(nama)	(nama)	(nama)
NIP	NIP	NIP

#### d. Sistik Penjaminan Mutu

- 1) Ketersediaan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- 2) Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang paling tidak termasuk:
  - a) Dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi.
  - b) Ketersediaan dokumen mutu yang dapat
- f) Bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan.
- 3) Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.
- 4) Bukti sahih terkait hasil Sertifikasi/ Akreditasi/ Audit Eksternal. Bagian ini



Indikator:	Skor 4:
Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Organisasi/fungsi SPMI</li><li>2) Dokumen mutu</li><li>3) Auditor internal</li><li>4) Hasil audit, dan</li><li>5) bukti tindak lanjut</li></ol>	Perguruan Tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, <b>memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI Berbasis Risiko (<i>Risk Based Audit</i>)</b> atau inovasi lainnya.
Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik terhadap pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.  Skkor = (A + B) / 2	Perguruan Tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik terhadap pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, melalui <b>mekanisme RTM (Rapat Tinjauan Mutu)</b> dan <b>mendapat pengakuan eksternal tentang pelaksanaan budaya mutu dari lembaga yang kredibel.</b>

# 1. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

## a. Sertifikasi/Akreditasi/Audit Eksternal

Tuliskan jenis sertifikasi/akreditasi eksternal dan audit eksternal keuangan yang diberlakukan di perguruan tinggi beserta opini (hasil sertifikasi/akreditasi/audit) dengan mengikuti format tabel berikut ini.

Tabel 1.a Sertifikasi/Akreditasi Eksternal dan Audit Eksternal Keuangan

### Sertifikasi/Akreditasi Eksternal

No.	Lembaga Sertifikasi/Akreditasi	Jenis Sertifikasi/Akreditasi	Lingkup (PT/Fakultas/Unit)**)	Tingkat (Nas/Int)**)	Masa Berlaku	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
...						

### Akreditasi Internasional Program Studi

No.	Lembaga Akreditasi Internasional	Program Studi	Status/Peringkat	Masa Berlaku	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					

### Audit Eksternal Keuangan

No.	Lembaga Audit	Tahun	Opini	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
...				

Tabel 1.b Akreditasi Program Studi

No.	Status dan Peringkat Akreditasi	Jumlah Program Studi												Jumlah	
		Akademik			Profesi			Vokasi							
		S-3	S-2	S-1	Sp-2	Sp-1	Pro-fesi	S-3T	S-2T	D-4	D-3	D-2	D-1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Terakreditasi Unggul														$N_{\text{Unggul}} =$
2	Terakreditasi A														$N_A =$
3	Terakreditasi Baik Sekali														$N_{\text{Baik\_Sekali}} =$
4	Terakreditasi B														$N_B =$
5	Terakreditasi Baik														$N_{\text{Baik}} =$
6	Terakreditasi C														$N_C =$
7	Terakreditasi Minimum														$N_M =$
8	Tidak Terakreditasi/ Kadaluarsa														$N_K =$
<b>Jumlah</b>															$N_{PS} =$

## **e. Kerjasama**

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
- 2) Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
- 3) Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
- 4) Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
- 5) Bukti sah kerjasama tri dharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi. (Tabel 1.c. LKPT).



Tabel 1.c Kerjasama perguruan tinggi

No.	Lembaga Mitra	Tingkat <sup>*)</sup>			Bentuk Kegiatan/ Manfaat	Bukti Kerjasama
		Internasional	Nasional	Wilayah /Lokal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Kerjasama Pendidikan</b>						
1						
2						
3						
...						
<b>Kerjasama Penelitian</b>						
1						
2						
3						
...						
<b>Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat</b>						
1						
2						
3						
...						

## C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan

- Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja tambahan

## C.2.6 Evaluasi dan Capaian

- Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian standar

### C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan

Indikator:	Skor 4:
Pelampauan SN-DIKTI (indicator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan <b>memiliki daya saing internasional</b> . Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan

### C.2.6 Evaluasi dan Capaian

Indikator:	Skor 4:
Analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, <b>dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan</b> .

## C.2.7 Penjaminan Mutu

Berisi deskripsi bukti yang sah sistem penjaminan mutu tata

## C.2.8 Kepuasan Pengguna

Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan mahasiswa, dosen,

C.2.7 Penjaminan Mutu	
Indikator:	Skor 4:
Efektivitas pelaksanaan system penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) Keberadaan dokumen legal formal penetapan standar mutu luaran, 2) standar mutu luaran dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu luaran yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan <b>dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu luaran yang melibatkan eksternal review.</b>
2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan terintegrasi	<b>pengguna</b>

## C.2.9

# Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari:  
pemosisian, masalah dan akar  
masalah, serta rencana  
perbaikan dan pengembangan  
tata pamong, tata kelola dan  
kerjasama.

TERIMA KASIH